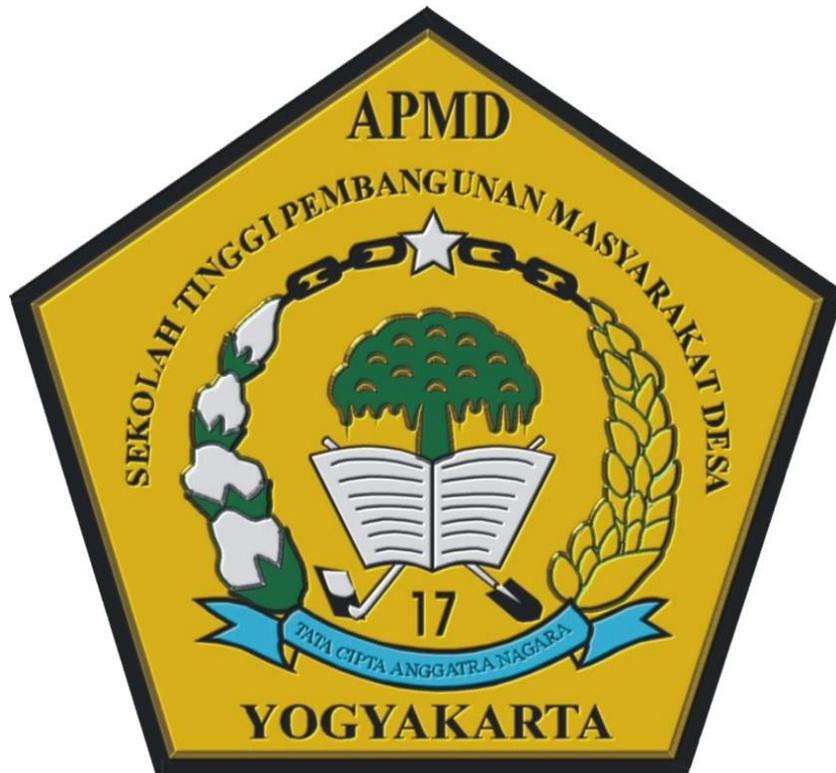


# TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN INTAN JAYA.

*(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Bidang Pelayanan Publik Terhadap  
Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua)*



**Tugas : Skripsi**

**Nama : Krismas Bagau**

**No. Mhs : 12520180**

**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD  
“APMD”**

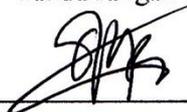
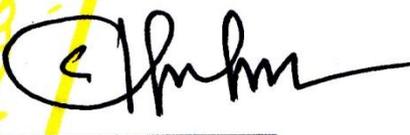


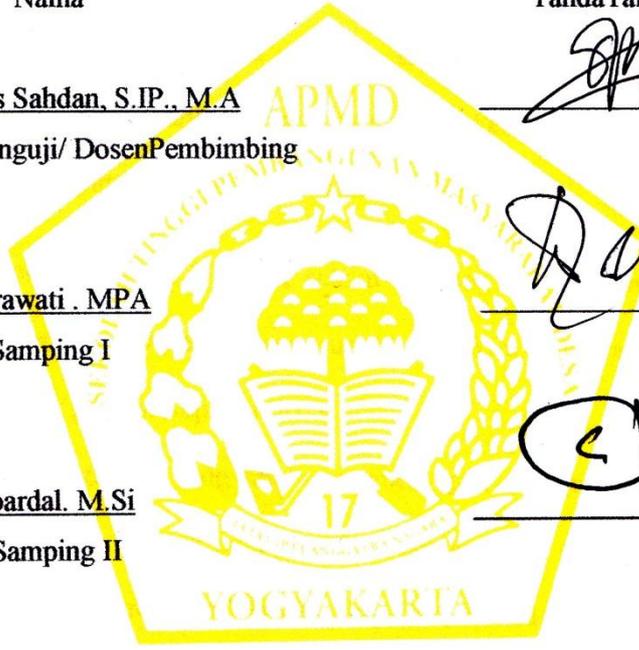
## HALAMAN PENEKESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tem Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD" Yogyakarta

Pada hari : Senin  
Tanggal : 17 Oktober 2016  
Jam : 15:00-16.00  
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD"

### TIM PENGUJI

- | Nama   | Tanda Tangan   |
|--|--|
| 1. <u>Geogoris Sahdan, S.IP., M.A</u><br>Ketua Penguji/ Dosen Pembimbing |   |
| 2. <u>Dra. Herawati, MPA</u><br>Penguji Samping I                        |  |
| 3. <u>Drs. Supardal, M.Si</u><br>Penguji Samping II                      |  |



Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



  
Geogoris Sahdan, S.IP., M.A

## HALAMAN MOTTO

### **1. Hidup adalah Perjuangan Mencari Aku.**

Mendengarkan dan bicaralah selengkap mungkin, jangan dipenggal  
sana-sini,

Hingga hasilnya bisa saja secara kebetulan dapat melukai hati orang lain

Lebih baik diam dan bekerja

Dan

Berbicara seperlunya sesuai dengan apa yang perlu disampaikan.

Ditambah atau dikurangi semuanya tidak bermanfaat.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepat pada semester delapan bulan november 2016 saya bisa diwisudahkan. Perjalanan pendidikan yang cukup panjang dalam menempuh pendidikan di luar Papua tepat di tanah gudeg Yogyakarta. Susah dan senang saya rasakan. Terlepas dari itu, tidak ada perbuatan yang lebih besar untuk menghormati dan menghargai bagi yang berjasa dalam hidupku. Dan tidak ada kata lain selain mengungkapkan perasan yang lebih mendalam kepada Tuhan yang maha esa. Tulisan akhir ini menjadi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Tulisan ini tidak terlepas dari bimbingan, tuntunan, dorongan, niat, semangat, harapan serta motivasi yang mendalam dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik menurut penurut penulis tetapi menurut pembaca saya tidak tahu, maka kritik dan saran demi penyempurnaan Tulisan sangat diharapkan. Dan kesempatan ini perkenangkanlah penyusun Skripsi ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Geogoris Sahdan, S.IP., M.A selaku Dosen Pemimping dalam proses penusunan skripsi dan Dosen Penguji samping satu Dra. Herawati dan Penguji Samping II Drs. Supardar M.Si
2. Bapak Apolos Bagau ST. yang selalu memberi sprit dan motivasi serta membiayai pendidikan sehingga saya mengenyam ilmu pengetahuan dan Melaluinyalah saya berusaha dapat the magic of thinking big (berpikir dan berjiwa besar). Sehingga skripsi ini dibuat sebagai penghormatan saya yang mendalam untuknya.

3. Ayahku Damianus Bagau (Almarhum) yang kehangatan pelukanmu tetapi engkau dipanggil oleh Tuhan, aku doakan semoga engkau bahagia bersama Pencipta.
4. Ibundaku Sisilia Japugau yang melahirkan dan membesarkan sekaigus menyekolahkan sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Semua jasa dan pengorbanan yang memberikan molir maupun materil serta bimbingan, motivasi dapat dibalas oleh Yang Maha Kuasa.
5. Kepada Istriku Priska Selegani (Almaharum) yang menemani menulis Skripsi ini sampai engkau di panggil Tuhan. Dan Buah Hatiku Vikoriana Elisabeth Bagau. Demi engkau anakku aku berjuang, Walau aku melupakanmu karena jarak memisahkan antara kita. Doa bapa dan anak menyertaimu Ibu Priska Selegani semoga engkau berbahagia disana bersama Bapa Di surga. R.I.P.
6. Adik-adiku sebagai tongkat estafet generasi Intan Jaya terutama: Tianus Bagau, Henderika Bagau, Gabrel G. Bagau, Eci Bagau, Fenderikus Bagau, Kalesmus Bagau, Nopianus Bagau, Melianus Belau, Delina Belau yang sedang mengenyam pendidikan disetiap tingkat sekolah semogga anda termotivasi.
7. Teman-teman KKN di Kabupaten Gunung Kidul, Desa Bandarejo di Pedukuhan Weru yaitu: Sr. Pantra Zenobia, Yulius Nandu Nggali Hama, Rilin Kurniyawan, Adrianus Carli Nantu, Kristianus Afriano Enga, Nelia Maria Liu Goncalves. Terima kasih banyak untuk kalian yang hebat dan semangat dalam proses pembuat laporan KKN lebih cepat, sehingga aku

boleh mendahului kalian Wisuda. Tetap semangat untuk kalian. Tuhan Menyertai kalian semua setiap usahanya.

8. Sahabat Senior diskusi disetiap Kesempatan dan memberi kontribusi pemikiran antara lain, Jemi Kudiai S.IP, Donatus Mote S.IP, Maikel Tekege S.IP, Selpi Adi, Fery M Zonggonau S.IP. M.Si, dan Paskalis Belau. Amakaniee
9. Anggota IPMMO Se-Jawa dan Bali Korwil Yogya-solo yang sudah selesai, ada pula yang putus sekolah, ada yang sudah meninggal, dan ada yang sedang kulia nama anda patut saya tulis disini sebagai penghormatan saya juga kepada kalian yang berjasa dalam perjuangan bersama yaitu: Agus Miagoni, Antomina Wandagau, Abed Nego Tipagau, Arry Alfered Yupini, Beny Mujijau, Dami Zanambani, Ellyyakim Belau, Feronika Selegani, Habakuk Jimi Hogajau, Yeffy Miagoni, Victor Y. Belau, Merkius Belau, Metina Pekei, Marselus Nagapa, Marten Itlay, Nani Miagoni, Ones Somau, Paulus Perianus Tipagau, Pertina Yarinap, Sembinus Mirip, Sarianus Mbisikmbo, Selina Jagani, Sofia Krar, Seiko Zagani, Yusup Hogajau, Yakius Hogajau, Yupinia Yarinap, Upi Melkias Zonggonau, Pius Tipagau, Laurensius Zonggonau, Kristopher Zonggonau, Yulius Belau, Roberta Holombau, Natalia Sani, Janias J. Yupini, Udi Zagani, Pianus Gelangagani, Maleaki Tipagau, David Wonda, Apianus Janambani, Nemi Kobogau, Merpis Kadepa, Elisabet Migau, Yosias Selegani, Kristina Kobogau, Musa Belau, Nunias Selegani, Musa Nabelau, Open Tipagau, Fransiskus Bunai, Milka Selegani, Ali Miagoni, Antonius Wandagau, Enius Zanambani, Habel Miagoni, Karpus Belau, Daniel

Emani, Justinus Miagoni, Alfrida Migau, Jhony Kobogau, Septinus Wandagau, Paskalis Belau, Benny Wandagau, Laurensius Zonggonau, Yusup Hogajau. Obet Mirip, Ruth Selegani, jacky Sondegau, Opianus Belau, Mariana Selegani dll yang saya tidak bisa sebut satu persatu.

## **Kata pengantar.**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa. Karena bisa dapat menuliskan skripsi ini. Sedikit gambaran bahwa Papua adalah salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terletak di ujung timur. Mendengar nama Papua menjadi isu hangat di setiap orang. Memang benar karena Papua itu unik, uniknya terletak pada suku, Bahasa dan budaya. Kabupaten Intan Jaya terletak di pegunungan tengah. Kabupaten Intan Jaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada tanggal 29 Oktober 2008. Kabupaten Intan Jaya ini merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Intan Jaya. Dengan Undang-Undang nomor 54 tahun 2008 ini dibentuklah Kabupaten Intan Jaya di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mendengar Kabuapten Intan Jaya tidak asing bagi yang mengikuti perkembangan Kabupaten Intan Jaya. Penulis Skripsi ini berasal dari kabuapten ini. Kabupaten Intan Jaya mengalami banyak persoalan. Persoalan yang bisa dapat dilihat adalah tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya. Penulis menulis skripsi ini melalui bantuan dan bimbingan dari banyak Pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya yang telah bekerja membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Namun penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum sempurna dalam tulisan dan tidak bisa luput dari kesalahan dari perhatian penulis. Oleh

sebab itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan, penulis sangat mengharapkan krtitik dan saran dari para pembaca sekalian.

Akhirnya, besar harapan penulis agar kehadiran skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk para pembaca, dan yang terpenting adalah semoga menambah dan memajukan ilmu pengetahuan.

**Yogyakarta, Oktober**

**Penulis**

**Krismas Bagau**

## Sinopsis

Tata kelola pemerintah di Kabupaten Intan Jaya saat ini sedang berjalan di tempat. Melihat kondisi objek di kabupaten Intan Jaya menjadi terminal umum bagi pengira jabatan dan pencari kerja. Setelah mendapatkan jabatan di dalam pemerintahan, Mereka tidak memperhatikan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai mandat yang diberikan. Pemerintah daerah jarang bertugas di daerah kabupaten Intan Jaya. tetapi mereka selalu berada di luar kabupaten Intan Jaya seperti di Kabupaten Nabire, Timika dan Jayapura. Mereka mengkalim bahwa kami keluar daam rangkah perjalanan dinas. Nyatanya perjalanan dinas memakan waktu dua sampai tiga bulan di luar Kabupaten Intan Jaya.

Melihat kondisi demikian berarti menimbulkan minimnya pelayanan pemerintah Kabupaten Intan Jaya terhadap masyarakat akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan dan sorotan terhadap visi, misi dan program Pemerintah Daerah.

Apa sebenarnya yang dilakukan selama periode 2012 -2016 ini. Visi, misi bupati dan wakil bupati yaitu Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya Sejahtera. Dalam implementasinya belum terlihat hingga sekarang. Masyarakat masih mengeluh dengan kesehatan mereka, tidak ada rumah sakit yang layak. Fasilitas Pendidikan rusak dan tidak tersedia, pengembangan ekonomi tidak jelas.

Lebih ironis lagi, masyarakat melakukan barter (tukar menukar) hasil kebun di tengah lingkungan perkantoran. Ini menunjukkan adanya kemunduran bidang ekonomi. Pegawai negeri yang memiliki uang dan seharusnya tinggal di Intan Jaya untuk membelanjakan uang mereka sehingga perputaran ekonomi berjalan sebagai bagian dari partisipasi membangun perputaran ekonomi, malah membawa uang keluar. Ini juga ulahnya para pimpinan di kabupaten Intan Jaya. Akhirnya tidak ada perputaran uang yang baik di Intan Jaya sehingga dampaknya masyarakat yang memiliki hasil dagangan tidak terjual. Lalu sejahtera mana yang mau diharapkan? Mereka mau belanjakan kebutuhan sekolah anak dengan uang mana? Membayar obat untuk anak yang sakit dengan uang mana? Parahnya lagi, pelayanan publik di kabupaten tidak berjalan dengan baik. faktornya adalah pejabat daerah mulai dari bupati, hingga para stafnya meninggalkan tempat tugas.

Mahasiswa melakukan demonstrasi di mana-mana menuntut realisasi visi, misi dan janji-janji pemerintah kepada masyarakat. Perempuan kabupaten Intan Jaya juga mempertanyakan peran dari organisasi TP. PKK di bentuk untuk siapa dan bikin apa selama ini? Alokasi dananya digunakan untuk apa?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Intan Jaya juga di tuntutan untuk menjalankan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan perannya sebagai perwakilan rakyat. Mereka di tantang oleh masyarakat untuk lebih berani mengkritisi pembangunan Intan Jaya yang kini carut-marut untuk kepentingan rakyat tapi bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu yang ditempatkan sesuai jabatan politik. Akhirnya pembangunan berjalan di tempat. Semua roda pemerintahan berjalan sesuai keinginan masing-masing mulai dari kepala daerah sampai dengan para stafnya. Menimbulkan berbagai pertanyaan tentang pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Intan Jaya.

## **Motto**

Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari jehuda  
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya,  
sampai ia datang berhak atasnya, maka kepadanya akan  
takluk bangsa-bangsa. Kejadia 49: 10

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab ia  
yang memelihara kamu 1 petrus 5:7

### **Hidup adalah Perjuangan Mencari Aku.**

Mendengarkan dan berbicaralah selengkap mungkin, jangan dipenggal  
sana-sini,  
Hingga hasilnya bisa saja secara kebetulan dapat melukai hati orang lain  
Lebih baik diam dan bekerja  
Dan  
Berbicara seperlunya sesuai dengan apa yang perlu disampaikan.  
Ditambah atau dikurangi semuanya tidak bermanfaat.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Daftar Isi</b>                |             |
| <b>Halaman Sambul</b> .....      | <b>i</b>    |
| <b>Halaman Pengesahan</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>Halaman Persembahan</b> ..... | <b>iii</b>  |
| <b>Kata pengantar</b> .....      | <b>vii</b>  |
| <b>Sinopsisi</b> .....           | <b>viii</b> |
| <b>Motto</b> .....               | <b>vi</b>   |
| <b>Daftar Isi</b> .....          | <b>viii</b> |
| <b>Daftar Pustaka</b> .....      |             |

## **BAB I. TATA KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN INTAN JAYA**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang .....   | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....  | 18 |
| C. Tujuan Penulisan .....                                       | 18 |
| D. Manfaat Penelitian .....                                     | 20 |
| E. Kerangka Teori   |    |
| a. Pengertian Governance .....                                  | 21 |
| b. Tata Pemerintahan Yang Baik .....                            | 34 |
| c. Tahap Kinerja Good Governance .....                          | 36 |
| d. Konteks Local Implementasi Tata Keola Pemerintahan .....     | 39 |
| e. Konsep Akuntabilitas Pelayanan Pemeritah Kepada Publik ..... | 42 |
| F. Definisi Konseptual .....                                    | 51 |
| G. Definisi Operasional .....                                   | 51 |
| H. Ruang Lingkup .....  | 52 |
| I. Metode Penelitian  |    |
| a. Jenis Penelitian .....                                       | 53 |
| b. Lokasi penelitian .....                                      | 55 |
| c. Sumber data .....  | 56 |

|   |    |
|---|----|
| d. Pengumpulan data .....                   | 56 |
| 1).Observasi .....                          | 56 |
| 2.) Interview .....                         | 57 |
| 3. ) Dokumentasi .....                      | 58 |
| e. Teknis analisis triangulasi .....        | 58 |
| f. Teknik analisis data interpretatif ..... | 59 |
| g. Penyajian data .....                     | 60 |

## **BAB II. PROFIL KABUPATEN INTAN JAYA**

### **A. KEADAAN GEOGRAFIS**

|  |           |
|--|-----------|
| a. Gambaran Umum Kabupaten Intan Jaya .....          | 61        |
| b. Kondisi Geografis .....                           | 63        |
| c. Batas Wilayah Kabupaten Intan Jaya .....          | 65        |
| d. Kondisi Alam:                                     |           |
| 1. Kondisi alam intan jaya .....                     | 65        |
| 1. <b>Flora</b> .....                                | <b>66</b> |
| 2. <b>Faun</b> .....                                 | <b>66</b> |
| 3. Iklim Dan Curah Hujan .....                       | 68        |
| 4. Status Pertanahan Yang Mempunyai Sertifikat ..... | 69        |
| 5. Luas Wilayah Dan Penggunaannya .....              | 72        |

### **B. KEADAAN DEMOGRAFI**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| a. Kondisi Sosial Budaya ..... | 73 |
|--------------------------------|----|

|   |    |
|---|----|
| b. Penyelenggaraan Pemeritahan .....                  | 75 |
| c. Jumlah Penduduk Kabupaten Intan Jaya .....         | 76 |
| d. Agama .....  | 77 |
| e. Mobilitas penduduk .....                           | 78 |
| f. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian.....   | 79 |
| g. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 89 |

### **C. SARANA PARASARANA DI KABUPATEN INTAN JAYA.**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| a. Sarana Komunikasi..... | 83 |
| b) Trasportasi .....      | 83 |
| c) Kesehatan .....        | 84 |
| a. Pendidikan .....       | 85 |
| b. Perekonomian .....     | 87 |

### **D. STRUTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN INTAN JAYA**

|   |    |
|---|----|
| a. Bagan pemeritahan Kabupaten Intan Jaya ..... | 99 |
| b. Sekretaria .....                             | 91 |
| c. Dinas .....                                  | 91 |
| d. Badan .....                                  | 91 |
| e. Kantor.....                                  | 92 |
| f. Tugas Fungsi Pemerintahan .....              | 94 |

## **E. POTENSI DAERAH**

|   |     |
|---|-----|
| a. Sumber Daya Pertanian .....                | 96  |
| b. Sumber Daya Pertanian Tanaman Pangan ..... | 96  |
| c. Sumber Daya Perkebunan .....               | 97  |
| d. Sumber Daya Peternakan .....               | 97  |
| e. Sumber Daya Tambang.....                   | 98  |
| f. Potensi Sumber Daya Mineral.....           | 99  |
| g. Potensi Sumber Daya Energi .....           | 99  |
| h. Sumber Daya Hutan .....                    | 100 |
| i. Pariwisata .....                           | 101 |

## **BAB III. ANALISIS DATA TENTANG TATA KELOLA**

### **PEMERINTAHAN KABUPATEN INTAN JAYA.**

#### **A. DESKRIPSI NARASUMBER**

|   |     |
|---|-----|
| a. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Usia .....          | 101 |
| b. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin ..... | 103 |
| c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan pekerjaan .....     | 105 |
| d. Deskripsi Narasumber berdasarkan jabatan .....       | 106 |
| e. Deskripsi narasumber berdasarkan pendidikan .....    | 107 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>B. AKUNTABILITAS PELAYANAN .....</b>                              | <b>109</b> |
| 1. Responsif Kepala Daerah Membangun Kabupaten Intan Jaya .....      | 112        |
| 2. Strategis Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Intan Jaya ..... | 118        |
| 3. Efektivitas Dan Evesiensi Kinerja Pemerintan Daerah.....          | 122        |

|   |            |
|---|------------|
| 4. Kesetaraan Dan Keadilan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Rakyat .....           | 126        |
| 5. Merespon pelayanan Kesehatan di Kabupaten Intan Jaya .....               | 129        |
| 6. Partisipasi pemerintah Terhadap Pendidikan .....                         | 133        |
| 7. Akuntabilitas Pemerintah daerah dalam menanggapi pelayanan Publik .....  | 141        |
| 8. Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik Bagi Masyarakat .....         | 147        |
| 9. Responsif DPRD Lemah Mengkritisi Kinerja Eksekutif .....                 | 150        |
| 10. Visi dan Strategis lemah Masyarakat Menangi Janji kampanye Pilkada..... | 151        |
| 11. Akuntabilitas Pelayanan Penyediaan infrastruktur .....                  | 155        |
| 12. Transparansi dan Responsif Kinerja Pemerintah .....                     | 155        |
| <b>13. Transparansi Kinerja Ketua TP. PKK Kabupaten Intan Jaya .....</b>    | <b>161</b> |
| 14. Pandangan Responsif Mahasiswa Terhadap Kabupaten Intan Jaya .....       | 166        |
| 15. Kesetaraan dan keadilan Bagi SKPD Dalam Membangun .....                 | 173        |
| 16. Kesetaraan Dan Keadilan Bagi Rakyat Belum Terwujud.....                 | 179        |
| 17. Visi strategis Pertumbuhan ekonomi masih berjalan ditempat .....        | 188        |

**C. PENYEDIAAN LAYANAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN INTAN JAYA DI NILAI MASIH LEMAH.**

|  |     |
|--|-----|
| <b>a.</b> Penyediaan Pekerjaan Infrastruktur Dasar .....                             | 192 |
| <b>b.</b> Akuntabilitas Pelayanan Kepala Daerah Dan SKPD Di Nilai Lemah .....        | 196 |
| <b>c.</b> Penyebabnya Pembangunan Di Intan Jaya Jalan Ditempat .....                 | 200 |
| <b>d.</b> Partisipasi Mahasiswa Dalam Demontrasi Damai mengkritisi pembangunan ..... | 200 |
| <b>e.</b> Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Pemerintah Masih Minim .....           | 206 |
| <b>f.</b> Transparan Bantuan Pendidikan .....  | 209 |

|   |     |
|---|-----|
| g. Penegakkan Peraturan Daerah .....                | 214 |
| h. Responsif Terhadap Penyediaan Infratraktur ..... | 222 |

**D. DAMPAK KEGAGALAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN INTAN JAYA.**

|   |     |
|---|-----|
| a. Geografis .....  | 225 |
| b. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Lemah .....                       | 225 |
| c. Sarana dan Prasarana yang terbatas .....                         | 226 |
| d. Kelembagaan pemeritahan .....                                    | 227 |
| e. Kurang Kontrol Kerja Lemah .....                                 | 228 |
| f. Kesetaraan Dan Keadilan Dalam Penempatan Jabatan Birokrasi ..... | 229 |

**E. PENERAPAN DEMOKRASI BUDAYA POLITIK MEMPERGARUHI  
TATA KELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA**

|   |     |
|---|-----|
| a. Pembangunan Prekonomian Kabupaten Intan Jaya .....               | 231 |
| b. Partisipasi masyarakat .....                                     | 233 |
| c. Pendidikan .....   | 234 |
| d. Eksistensi .....   | 235 |
| e. Kesenian .....   | 236 |
| f. Organisasi Sosial Kemasyarakatan .....                           | 237 |
| g. Belum Efektif dan efesien pembangunan Kabupaten Intan Jaya ..... | 239 |
| h. Transparansi Pemerintah Daerah Membantu pendidikan .....         | 244 |

## **F. SOLUSI OPTIMALNYA TATA KELOLAAN PEMERITNAH**

### **KABUPATEN INTAN JAYA.**

|   |     |
|---|-----|
| a. Peningkatan Tata Kelolaan Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya .....        | 248 |
| b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Masyarakat Kabupaten Intan Jaya .....     | 249 |
| c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya ..... | 250 |
| d. Pengurangan masalah kemiskinan Kabupaten Intan Jaya .....                | 251 |
| e. Peningkatan efektivitas Derajat Kesehatan Kabupaten Intan Jaya .....     | 253 |
| f. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah .....           | 254 |
| g. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik .....                       | 254 |
| h. Penyediaan Program Pembangunan .....                                     | 255 |
| i. Pendidikan .....   | 256 |
| j. Kesehatan .....  | 257 |
| k. Responsif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Rakyat .....                     | 258 |
| l. Penyediaan dan Perawatan Infrastruktur .....                             | 262 |
| m. Perlu profesionalisme Peningkatan akuntabilitas Pelayanan Publik .....   | 264 |
| n. Perlu adanya Konsesus .....  | 265 |

## **BAB IV. PENUTUP**

|                  |     |
|------------------|-----|
| KESIMPULAN ..... | 266 |
| SARAN .....      | 270 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paniai. Kabupaten ini belum menunjukkan adanya gerbakan dalam suatu program kerja yang melibatkan semua elemen masyarakat terutama dalam pelayanan publik. Masih terlihat bahwa berbagai aspek pelayanan public di Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua ini belum menunjukkan adanya keperpihakan kepada masyarakat. Terutama dalam rangkai melibatkan semua pihak di Kabupaten Intan Jaya, maka kondisi nyata hari ini perlu diteliti dan dianalisis baik demi memperoleh jawaban kepastian dengan pendekatan khusus.

Pandangan dan analisis situasi kabupaten Intan Jaya yang berbeda antara satu dengan lainnya dalam pelayanan. Memandang kabupaten Intan Jaya perlu adanya penilaian yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang lebih nampak seperti “Suka dan Tidak Suka, benar dan salah”. Ketika melihat dengan pendekatan dengan kedekatan khusus untuk melihat seorang pemimpin yang sedang berkuasa atau pelaku pembangunan, mereka akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut benar adanya. Apa pun yang dilakukan entah itu salah atau benar, baik atau tidak. sudah menjadi sebuah tradisi terhadap gaya berpikir yang dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu. Sebaliknya apabila kita tidak suka dengan pemimpin tersebut, mungkin karena masa lalu dalam proses politik untuk mencapai kepemimpinan tersebut, atau persoalan lainnya, Namun juga berasaskan teori-teori pembangunan pemberdayaan yang mempengaruhi

pengetahuan para intelektual dari berbagai disiplin ilmu sehingga dapat menjadi kerangka dalam menilai proses pembangunan di Intan Jaya dapat terlihat gagal dalam membangun.

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu daerah otonom baru, tentunya untuk menjawab pembangunan di Papua selama ini maka diterapkan pemekaran kabupaten Intan Jaya untuk mempermudah akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar sehingga kehadiran pemerintah menjadi agen perubahan yang dapat terlihat jelas terjadi sebelumnya. Diterapkannya pemekaran kabupaten di Propinsi Papua ini, bertujuan adalah untuk dapat menjawab persoalan yang dialami penduduk asli Papua terhadap penyimbangan pembangunan yang terjadi selama ini, maka dengan pemekaran tersebut perlu mendapat perhatian dalam pelayanan maksimal sangat diperlukan. Pemekaran sebagai salah satu jawaban positif yang adil dan merata maka perlu dimaksimalkan secara baik. Disisi lainnya perlu menunjukkan keadilan mempercepat pembangunan kesejahteraan terhadap masyarakat dari ketidakadilan negara terhadap warga negara Indonesia di Papua pada umumnya.

Melihat dari kondisi real saat ini terhadap tindakan pemerintah pusat melalui pendekatan kemanusiaan sedang terwujud. Salah satunya adalah pemekaran kabupaten Intan Jaya supaya keadilan bagi warga masyarakatnya nyata dari Pelanggaran HAM yang pernah dilakukan dengan cara yaitu: Penangkapan, Penyiksaan, Pembunuhan, Pemenjarahan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, disisi lain dengan memberi stigma makar, separatisme dan OPM. Sementara, secara ekonomi penduduk asli Papua benar-benar disingkirkan dan dimiskinkannya membuatnya gizi buruk dan kematian

penduduk asli Papua hampir setiap hari. Melihat dan membaca situasi Papua menjadi bagian yang sulit diselesaikan masalahnya. Di sisi lain persoalan pembatasan yang berlebihan dari aparat keamanan Indonesia ketika menyuarakan kegagalan pembangunan saat ini dihalangi oleh aparat keamanan negara. Hal itu juga nampak di Kabupaten Intan Jaya sehingga Orang Asli Papua di Kabupaten Intan Jaya kehilangan hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul dalam kerangka pembangunan kesejahteraan dan memberi pelayanan yang prima dari pemerintah daerah. Maka mahasiswa sebagai agen pendorong pernah melakukan demonstrasi damai oleh mahasiswa se-Indonesia dibubarkan paksa oleh Brimob.

Terlepas dari itu, melihat dengan rasional bahwa daerah pemekaran Otonom baru seharusnya menjawab aspirasi rakyat. Namun pemerintah daerah saat ini nampak dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Intan Jaya masa pemerintahan definitif belum atau masih belum menyelenggarakan pemerintahan dengan betul dan benar. Pemerintah daerah saat ini berjalan ditempat dari berbagai aspek budaya, politik, ekonomi, social, pendidikan, kesehatan, pelayanan public dan infrastruktur pasca pemekaran Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua.

Pemekaran Kabupaten Intan Jaya sebenarnya dilakukan untuk mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan sulit dijangkau dengan transportasi darat maupun laut, Maka pemerintah Indonesia menerapkan pemekaran daerah. Tujuan utamanya dari pemekaran bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat. Dalam rangkanya proses pembangunan percepatan akutabilitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari keadilan pemerataan daerah seperti indoneia lainnya. Salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya yang terdapat di penguasaan tengah di Propinsi Papua. Dalam rangkah penyelenggaraan

pemerintahan terutama kebijakan desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diatur dan dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan tata kelolaan pemerintahan dengan undang-undang untuk menjawab ketertinggalan dari berbagai aspek yaitu: Ekonomi, Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, politik, social dan infrastruktur dasar yang baik. Pembangunan di Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua terlihat masih tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten Intan Jaya lainnya, salah satunya alternatif untuk mengalahkan ketertinggalan dan berusaha untuk bersain dengan daerah lain pun menjadi stagana atau tidak jelas. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya belum menunjukkan sejajar dengan Kabupaten lainnya dari berbagai aspek pembangunan karena gagal dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya yang memihak kepada masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena tidak melibatkan semua elemen masyarakat.

Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahann undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dengan kepentingan masyarakat setempat belum menunjukkan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan Otonomi daerah sebagai berikut: Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: Menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah,

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya sains daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya sains daerah perlu diperjuangkan sambil membangun pembangunan keperpindahan kepada masyarakat kecil terutama menjadi tuan di negerinya sendiri dalam proses pembangunan keperpindahan kepada masyarakat.

Sudah jelas bahwa undang-undang pemerintahan mengaturnya. Namun tata kelola pemerintahan belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Apa lagi adanya Otonomi Daerah tentu saja untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan *good governance* di Kabupaten Intan Jaya sudah merangkul pembangunan daerah dengan visi dan misi Kabupaten Intan Jaya jelas yaitu: Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya Sejahtera sejak 2012 sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya di Kabupaten Intan Jaya. Dari visi dan misi itu diharapkan dapat mempercepat pelayanan yang maksimal dengan terwujudnya peningkatan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat dengan adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pelayanan publik yang memuaskan. Namun sampai kini, pelayanan publik terhadap masyarakat sangat minim dan stagnan. Program kerja Pemerintahan tidak dijalankan dengan normal di daerah kabupaten Intan Jaya. Apa lagi melibatkan masyarakat dalam merumuskan pembangunan daerah untuk mewujudkan semua visi dan misi pemerintah daerah yang kini belum menunjukkan gebrakan pelayanan publik yang maksimal.

Pemerintah pusat menerapkan Otonomi Khusus bagi wilayah yang sulit dijangkau dengan maksud menjalankan pemerintahan di daerahnya sendiri

dengan baik dan benar, Namun disisi lain juga pemerintah pusat membiarkan pemerintah kabupaten berjalan sendiri tanpa kontrol yang jelas dalam pembangunan, terutama di wilayah pemekaran seperti di Kabupaten Intan Jaya. Sehingga menciptakan raja-raja kecil di daerah di atas penderitan masyarakat. Pada hal, kabupaten hadir untuk menciptakan pemeritahan yang melayani. Dalam rangkah penyelenggaraan tata kelolaan pemerintahan daerah menjadi wujud kebijakan desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai bagaian integral dari pemerintah daerah.

Ada pun secara filosofis, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Tujuannya, untuk kesejahteraan yang mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk menciptakan kesejatraan masyarakat dan lebih dari itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan public secara efektif, efisien dan ekonomis melalui pembangunan. Hal demikian masyarakat sangat merindukan perubahan daerah. Maka pemerintah perlu berpihak kepada masyarakat lokal yang demokrasi, akuntabel dan penegahkan hukum yang benar dan adil sehingga dalam proses pelayanan pembangunan keberpihakan kepada masyarakat sangat terasa.

Dari tataran filosofis di atas nampak bahwa pemerintahan daerah dituntut untuk mampu mensejahterakan masyarakat lokal secara demokratis. Proses demokrasi di tingkat lokal akan nampak bila pemerintah menyelenggarakannya dengan baik dalam proses penyusunan peraturan daerah, Perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan daerah lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintahan daerah harus mampu mengartikulasikan serta mengagregasikan kepentingan masyarakat, maka perlu pulabakwa untuk mengakomodasikan pluralitas sosial ke dalam perencanaan kegiatan pemerintahan daerah perlu adanya penyediaan ruang partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Intan Jaya melalui pembangunan yang adil dan nyata.

Kebijakan pembangunan otonom baru seperti di Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua ini. Pembangunan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sebagai *alternative good governance* dengan mengatualisasi falsafah hidup di Kabupaten Intan Jaya untuk meingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi pertumbuhan ekonomi, Sosial, pendidikan, Budaya, Pelayanan Public dan Infrastruktur dasar di daerah Pemekaran terutama di Kabupaten Intan Jaya dengan rumusan “Ondomadage Haingia Dua Dia Artinya: Untuk Semua Berpikir Dan Bekerja”. Falsafah ini menjadi motto umum dalam rangkai pelaksanaan. Melalui kebijakan publik pembangunan terhadap pelayanan publik dan penyediaan layanan bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya. Tujuan utamanya adalah untuk dapat membangun sambil memberi perhatian khusus bagi masyarakat sambil membangun daerah yang masih terisolasi dan sulit dijangkau oleh transportasi darat maupun laut. Salah satu cara yang tertuang dalam

pelaksanaan/implementasi kebijakan tata kelolaan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya adalah untuk dapat mempercepat pembangunan dari berbagai ketertinggalan. Harapan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu instrumen yang terbaik dalam pelayanan adalah menyelenggarakan good governance secara adil, jujur dan transparan di semua kehidupan masyarakat terutama dalam pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, Pelayanan Public Dan Infrastruktur boleh katakan staganaga atau jalan ditempat.

Pada saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tertuang dalam UUD 1945, disisi lain juga pola yang dianut adalah otonomi seluas-luasnya tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar. Ini berarti bahwa daerah yang diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan daerah yang menjadi kepentingan masyarakat daerah, kecuali yang ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah pusat. Namun, agar urusan pemerintahan yang bersifat permusatan, konsentrasi dapat dibagi secara proporsional antar tingkatan pemerintahan maka sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah telah diatur kriteria pembagian urusan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu, eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Dengan menerapkan ketiga kriteria tersebut, maka deskripsi urusan pemerintahan Kabupaten Intan Jaya dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik dan benar menurut pemerintah daerah. Namun menurut pandangan masyarakat adat, tokoh intelektual, tokoh pengamat dan tokoh agama mengatakan pemerintah daerah saat ini sangat gagal dalam membangun Kabupaten Intan Jaya dengan hati dan iman. Hal itu terlihat jelas dari minimnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Intan Jaya saat ini. Pemerintah daerah belum membuktikan bahwa

pemerintah daerah tidak pernah berada di kabupaten Intan Jaya sebagai tempat bekerja dan menjalankan program kerja pemerintah daerah. tetapi sampai saat, belum menunjukkan pelayanan kepada kepentingan publik melalui sarana parasarana yang dapat mengutamakan kepentingan umum dalam pembangunan yang menyentuh dan merata akan tetapi Kabupaten Intan Jaya saat Ini menjadi tempat terminal umum bagi pengila jabatan dan pencari kerja. Mengapa pemeritnah daerah tidak pernah berada di tempat tugas.

Namun sebaliknya pelayanan publik terhadap masyarakat masih lemah yan dilakukan oleh pemeritnah daerah. Lemahnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan program kerja pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk dapat melibatkan langsung kepada masyarakat belum juga terlihat selama ini. Hal demikian terbukti bahwa Pemerintah daerah jarang bertugas dan berada di daerah Intan Jaya. Akibatnya pelayanan melemah apa lagi Pembangunan di Kabupaten Intan Jaya belum menunjukkan terhadap masyarakat sipil. Hal ini disebabkan karena adanya faktor penghambat dalam penerapan kebijakan di Kabupaten Intan Jaya berdasarkan kepentingan politik yang dapat menempatkan jabatan politik yang tidak berkualitas. Hal demikian itu tentu saja, disebabkan karena pembaggian jabatan berdasarkan jabatan politik dan proyek Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di monopoli oleh kepala daerah karena para SKPD juga lemah mengolah tugas dan tanggungjawabnya.

Hal demikian juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat. Masih ditemukan banyak kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan keperpihakan kepada mayarakat adat di Kabupaten Intan Jaya, diakibatkan karena kelemahan pemerintah daerah yang tidak mampu menjalankan good gavernance

karena penempatan jabatan di Kabupaten Intan Jaya berdasarkan jabatan politik bukannya penempatan jabatan berdasarkan jabatan karier. Penyebab demikian terlihat jelas, sehingga kegagalan nampak jelas bahwa tata kelolaan pemerintahan Kabupaten Intan Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pertama, Kurang adanya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang handal,
2. Kedua, Geografis pelayanan pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyulitkan,
3. Ketiga, Jaminan kesehatan dan pendidikan yang sangat minim dan terbatas sehingga angka kematian tinggi,
4. Keempat, Pembangunan infrastruktur berjalan di tempat karena indeks kemahalan pembangunan,
5. Ke lima, manajemen pelayanan yang kurang baik dan
6. Keenam penempatan jabatan berdasarkan jabatan politik sehingga melemahnya pelayanan kepada masyarakat di bidang Ekonomi, pendidikan, Budaya, Pelayanan Public dan Infrastruktur saat ini.

Melihat pemimpin dan kepemimpinan yang tampil daerah ini dengan otoriter dalam memimpin. Selain itu tidak ada kebebasan kepada para SKPD untuk menjalankan program pemerintahan saat ini dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha melihat kondisi objektif sambil menunjukkan pada tujuan pelaksanaan pembangunan melalui tata kelolaan pemerintahan kabupaten Intan Jaya sebagai daerah kabupaten. Pasca pemekaran masih dapat menempatkan kebebasan berekspresi dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka membangun negerinya sendiri atau

sebaliknya pembangunan berjalan ditempat atau sudah berjalan sehingga banyak orang mengatakan bahwa pembangunan gagal dalam mengimplemtasikan.bisa terjadi gagal karena akuntabilitas terhadap good gavernance dalam pelaksanaan pembangunan Intan Jaya belum terlihat jelas dalam implementasinya.

Melihat proses kebijakan di Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan baik sehingga terjadi banyak persoalan terhadap pelayanan public kepada masyarakat melalui pelaksanaan good governance di Kabupaten Intan Jaya. Para elit politik dalam birokrasi structural dalam menciptakan kekuasaan politik dalam pemerintahan sehingga sulit menjalangkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkannya oleh masyarakat.

Melihat dari studi kritis pembangunan yang terjadi dikabupaten Intan Jaya dengan meninggalkan semua kepentingan masing-masing. Tetapi mengutamakan kepentingan umum untuk dapat menempatkan pada posisi sebenarnya yaitu masyarakat kecil yang menjadikan subyek dengan melihat proses pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Dari sudut pandangan masyarakat sebagai masyarakat asli Sugapa, daerah di mana saat ini menjadi ibukota kabupaten.

Masyarakat lebih cenderung melihat situasi ini dari *Hati, Nurani Dan Logika* terhadap situasi Intan Jaya saat ini. **Pertama Hati**, Hati menjadi tawar ketika melihat pembangunan yang terjadi saat ini di Intan Jaya. Betapa tidak, situasi dulu, kehidupan masyarakat yang begitu baik dan hidup dalam kekeluargaan yang harmonis namun saat ini mereka hidup dalam kecurigaan bahkan saling bermusuhan. Apa sebenarnya motif penyebabnya, Kedua Nurani. bergerak ketika melihat model pembangunan saat ini, pembangunan dirancang

tidak terarah sesuai kebutuhan daerah dan rakyat. Berikut adalah pembangunan dilakukan hanya “Seenak Perut”. Dalam arti bahwa dalam perencanaan pembangunan diatur lain dan muluk-muluk tetapi dalam pelaksanaan dilakukan sesuka hati pemimpin/penguasa. Ketiga Logika. Logika, melihat bahwa pembangunan di Intan Jaya saat ini jalan di tempat bahkan mengalami kemunduran di bandingkan masa “Karateker”. Pada masa karateker pembangunan dipacu dengan sangat cepat. Dari sisi fisik dan pembangunan manusia. Walaupun saat itu anggaran pembangunan dan masa karateker sangat terbatas. Hal ini menurut pandangan masyarakat, pokok masalah terletak pada “Manusia”. Dalam hal ini adalah sang pemimpin/kepala daerah. Kalau pemimpin tidak mampu maka ikutan kebawahnya juga akan lemah mengikuti ketidakmampuan pemimpin tersebut.

Sebuah ilustrasi falsafah dari pandangan atau pemikiran adalah Pemimpin itu ibarat air yang mengalir di “*Kali Wabu*”. Apabila kali tersebut keruh/atau kabur dari kepala air, maka akan kabur sampai ke muara. Kita tidak mungkin bisa menjernihkan air tersebut dari muara atau pertengahan kali tersebut karena itu pekerjaan yang sia-sia. Untuk menjernihkan air kali tersebut hanya bisa dilakukan di kepala air. Pemimpin dan kepemimpinan itu yang harus di evaluasi kalau ingin adanya perubahan terjadi di Intan Jaya.

Fakta Intan Jaya hari ini seperti demikian. Kepala Daerah keluar daerah, semua kepala dinas dan staf ramai-ramai ikut keluar juga. Akibatnya pelayanan publik di Intan Jaya lumpuh total. Bayangkan saja kalau bupati tidak berada tiga bulan di Sugapa, berapa kerugian rakyat dalam menerima pelayanan, baik materil maupun non materil. Begitupun sebaliknya. Apabila bupati berada tiga bulan di

Sugapa, betapa bagusnya pelayanan karena para staf mendapat pengawasan langsung. Dengan pandangan atau Pemikirannya adalah melihat situasi Intan Jaya saat ini dipersalahkan kepada kepala dinas atau staf tetapi dapat memperlihatkan bahwa kepala daerah yaitu Bupati sebagai kepala daerah tidak melaksanakan sumpah dan janji kepada Tuhan, Negara dan Masyarakat Intan Jaya ketika di lantik namun jarang berada di tempat tugas

Kurang adanya media menjadi sebuah alat komunikasi efektif yang mempunyai multi fungsi. Beberapa di antaranya seperti fungsi pembelajaran, memberikan berbagai informasi dan menghibur. Sehingga media menjadi alat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Kehadiran media pun tidak menjelaskan pembangunan daerah kabuapten intan jaya berangkat dari beberapa alasan yang menjadi dasar. Alasan tersebut terlihat seperti, kondisi masyarakat Intan Jaya saat ini dapat dikatakan memprihatinkan. Kondisi demikian bisa lihat bahwa:

- a. Kondisi kesehatan. Kesehatan di Intan Jaya dapat di katakan sedang “Sakit Parah”.
- b. Kondisi Pendidikan. Kondisi Pendidikan di kabupaten Intan Jaya dapat di katakan sedang “Stroke Berat”
- c. Kondisi Ekonomi, kondisi ekonomi di kabupaten Intan Jaya dapat dikatakan sedang “lapar dan mati”
- d. Kondisi Politik, Kondisi Politik di kabupaten Intan Jaya boleh dikatakan “tidak sehat “
- e. Kondisi Social, Kondisi Social di Kabupaten Intan Jaya saat ini dikatakan masih belum berjalan sebagaimana diharapkan saat ini.

- f. Kondisi Budaya, Kondisi Budaya Kabupaten Intan Jaya saat ini mulai sakit.
- g. Kondisi Pelayanan public, Kondisi Pelayanan public di Kabupaten Intan Jaya saat ini di katakan masih belum menunjukkan hasil yang mengembirakan.
- h. Kondisi Infrakstruktur, kondisi Infratraktur di Kabupaten Intan Jaya saat ini di katakatan berjalan di tempat.

Kondisi perekonomian masyarakat Intan Jaya dapat di katakan “Mati Suri” alias layu dan menunggu mati. Kondisi ini dapat dilihat ketika masyarakat mendagangkan hasilnya di pasar dan tidak laku terjual. Maka terjadilah “Barter”. Barter adalah kegiatan tukar menukar barang. Hal itu terjadi ketika belum ada alat tukar/uang. Dan kondisi itu terjadi pada jaman dulu. Kalau kondisi ini terjadi saat ini di Intan Jaya dan di tengah ibukota kabupaten yaitu Sugapa yang berkelimpahan uang berarti ini ada masalah yang berat. Atau bisa disebut proses pemunduran. Hal sederhana dapat lihat dari:

1. *Pertama*, peredaran uang tidak ada di Intan Jaya, para pejabat yang memiliki uang jarang berada di daerah.
2. *Kedua*, uang yang keluar dari kabupaten Intan Jaya lebih besar ketimbang yang masuk. Kondisi ini sangat jelas bahwa yang memiliki uang lebih banyak di Intan Jaya adalah para Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI. Apabila mereka keluar dari kabupaten dan menginap di luar maka otomatis mereka akan belanjakan uang di luar. Sudah barang tentu uang tidak berada di Intan Jaya. Yang menjadi korban adalah masyarakat Intan Jaya yang nota bene ekonomi lemah.

3. *Ketiga*, lemahnya kepemimpinan kepala daerah dan birokrasinya. Hal tersebut berkorelasi langsung dengan pelayanan publik.
4. *Keempat*, Intan Jaya dijadikan tempat “Singga” bagi para pencari kerja dan penggila jabatan. Ketika mereka mendapatkan apa yang diinginkan yaitu jabatan dan uang, mereka akan pergi dan menikmati hidup di Nabire, Timika, Jayapura atau pun Jakarta dan tempat-tempat kota besar lainnya. Beberapa hal yang telah disebutkan diatas berdampak langsung pada perekonomian rakyat Intan Jaya saat ini.

Masyarakat Intan Jaya yang di dalamnya terdiri dari berbagai kelompok, tingkatan dan status sosial. Di antaranya Pelajar dan Mahasiswa menjadi bagian penting dalam masyarakat. Kelompok tersebut saat ini dikatakan kritis terhadap kondisi daerah. Oleh sebabnya sebagai upaya meminimalisir kondisi Intan Jaya yang carut-marut maka muncul sebuah ide dan menjadi kebutuhan yaitu perlu adanya sebuah wadah atau alat penyaluran berbagai informasi pembangunan secara transparan.

Daerah Intan Jaya yang saat ini pada kondisi mau mati tidak bisa, mau hidup juga tidak bisa. Semua informasi pembangunan Intan Jaya di isolasi/lokalisir oleh penguasa sehingga akses informasi pembangunan tidak dapat dijangkau oleh berbagai pihak bahkan publik. Hal yang di pertontonkan adalah keberhasilan-keberhasilan kecil yang tidak berimplikasi langsung terhadap kehidupan kerakyatan di Intan Jaya. Ibarat seekor ayam betina yang habis bertelur “satu butir” dan dia berkotek keliling untuk semua mengetahuinya. Pada hal Cuma satu butir. Ayam itu bisa bertelur dimana saja, atau tempatnya sembarang sehingga dari sisi keamanan tidak terjamin. Berbeda dengan “Penyu/Kura-Kura”. Penyu

atau kura-kura sekali bertelur jumlahnya ratusan. Selesai bertelur ia akan menguburkan dengan baik-baik sehingga aman dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Masa tetas, semua telur bisa menjadi hasil. Kura-kura tidak bisa bertelur di tempat sembarangan tetapi dia akan mencari tempat yang lebih aman.

Mungkin pemerintah Intan Jaya perlu belajar banyak dari “Karakter Kura-Kura/Penyu”. Jangan belajar atau menggunakan karakter ayam. Buat kegiatan kecil yang bukan dilakukan di Intan Jaya tetapi dilakukan di Jayapura dan Nabire atau di luar Intan Jaya, ia berkotek di semua media. Pada hal pembangunan tidak nampak terlihat jelas bagi masyarakat Intan Jaya. Masyarakat saat ini membutuhkan pemimpin revolusi yang bisa dapat membawa mereka suatu transformasi kehidupan masyarakat.

Kondisi di atas tidak pernah terekspos secara transparan. Dan juga informasi kepada masyarakat bahwa sangat diisolasi. Tidak ada ruang informasi dan ruang demokrasi, ruang solusi dan juga ruang aspirasi bagi masyarakat dalam pembangunan daerah Intan Jaya. Masyarakat Intan Jaya ada dan tersebar diberbagai daerah. Mereka juga rindu ingin mengetahui perkembangan daerah mereka seperti apa. Namun yang terjadi selama ini tidak ada ruang informasi yang lebih akurat dari dalam wilayah Intan Jaya itu sendiri. Yang terjadi selama ini, informasi yang beredar selama ini lewat media cuma informasi “pencitraan” namun bukan informasi pembangunan mendasar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan pula pokok pemikiran dalam perumusan permasalahan penelitian tata kelolaan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya terhadap dinamika pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya sendiri melalui pembangunan yang sesuai

dengan amanat undang-undang sehingga visi dan misi pembangunan yang dapat disukseskan sesuai visi dan misi pemerintah daerah di kabupaten Intan Jaya yaitu: Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya sejahtera.

Ternyata visi dan misi tersebut dirancangan di kabupaten Intan Jaya menjadi gagal dalam pelaksanaan pembangunan mendasar untuk dapat mengimplemntasikan di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini disebabkan karena kepala daerah yang sebenarnya menjadi kepala birokrasi Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya tidak pernah ditempat kerja dan tidak dapat mendisiplinkan SKPD dalam pemerintahan demi akuntabilitas pelayanan tetapi lebih banyak diluar kota Kabupaten Intan Jaya, kepala daerah yang seharusnya menjadi contoh bagi birokrasi tetapi tidak terjadi, di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini menjadi persoalan besar maka harus di teliti dan di analisa dengan baik. Disamping itu kepala daerah tidak melibatkan birokrasi dilingkungan pemerintahan daerah untuk melakukan evaluasi kerja dengan baik dan benar sesuai prosedur yang ada untuk dapat melibatkan semua pihak dengan baik untuk dapat menyususkan visi dan misinya.

Disisi lain sesuai dengan amanat otonomi khusus seharusnya dapat membangun daerah dengan mempertanggungjawabkan program-program kerja yang direncanakan seperti:

1. Pertama Mempercepat pembangunan infratraktur,
2. Kedua membuka akses terutama jalan raya, lapangan terbang, tata kota dan lain-lain, dan
3. Tiga dengan pembangunan infrastruktur jalan raya yang menghubungkan di desa dengan desa, desa ke listrik atau kecamatan

dari kecamatan ke kabupaten dalam rangkai pelayanan kepada rakyat di Kabupaten Intan Jaya.

## **B Rumusan Masalah**

Dengan demikian, dalam pertanyaan penelitian ini adalah bahwa masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana tata kelolaan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya”.

## **C.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Intan Jaya tentang tata kelola pemerintahan Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten intan jaya ini perlu memperjelasnya bagaimana proses tata kelola pemerinahannya. Melihat dan menganalisa pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Perlu memperjelskan tiga hal yang menjadi penting yaitu: Pertama, menggambarkan tata kelola pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Kedua menjelaskan kegagalan pengelolaan pemerintahan kabupaten Intan Jaya, Ketiga, menguraikan kegagalan menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Intan Jaya. Untuk itulah perlu melihat jelas dalam Proses implementasi pembangunan yang selanjutnya dapat memberi keberpihakan kepada masyarakat dengan program pembangunan yang menyentuh bagi masyarakat melalui keterlibatan mereka. Dalam proses pembangunan tersebut adakah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Intan Jaya yang sedang terjadi saat ini di daerah dengan pendekatan pengamatan, wawancara sambil melihat kondsis objektif di lapangan. Memang melihat transpormasi pembangunan bagi masyarakat setempat menjadi

Daftar Pustaka:

1. Dede Rosyada Dkk, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah,).
2. Widodo dan supardal, 2011, Agenda Aksi Penguatan Pemerintahan Local. Litbang Pustaka Utama Yayasan.
3. Syakrani dan syahriani, 2009, good governance, penerbit pustaka pelajar,.
4. Miftah Thoha, 2012, Birokrasi pemerintahan, penerbit MatapenaInstitute,.
5. Sumber, google tentang tata kelola pemerintahan daerah.
6. Dede Rosyada Dkk, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah,).
7. Tabuni Nenu, 2010, rekam jejak “sebuah Refleksi “ perjuangan masyarakat moni menuju intan jaya, penerbit pemerintah Kabupaten Intan Jaya (dicetak: Galangpress (Anggota Ikapi),).
8. Awan Setya Dewanta dkk, 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, penerbit: ICMI PUSAT OLEHPENERBIT Adiya Media.
9. Usman Sunyaoto, 2006, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, penerbit: pustaka Pelajar.
10. Hardiyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, konsep, dimensi, indicator dan Implementasi, penerbit Gava Media.
11. J. Kaloh, 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah, penerbit Sinar Grafika Jakarta.
12. Sri Sumarni, Good University Government dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas-Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
13. Teras Narang, Good Governance dan Clean Government Dalam Implementasinya di Provinsi Kalimantan Tengah, Seminar Nasional Pergeseran Paradigma Pemerintahan dari Government ke Governance: Teori dan Praktek, Komap Fisipol UGM, 2007, Yogyakarta.
14. Sutoro Eko, Manifesto Pembaruan Desa, penerbit penerbit APMD Press, Yogyakarta.
15. Data document pembangunan kabupaten intan jaya.
16. Bagau Krismas, 2015, surat Buletin edisi ke-I, dan ke- II “*Intan Jaya Menuju perubahan*”. Generasi Masa depan Tanggungjawab siapa dan Visi Dan Misi Bupati Intan Jaya Pintar, Intan Sehat Dan Intan Jaya Sejahtera Di Pertanyakan?
17. Media yang mendukung dalam tulisan adalah: Majalah selangkah, tabloidjubi, papuapos nabire,